



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud karena terdapat 3 unit Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 2 Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, 5 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMAN menjadi SMKN, 2 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMKN menjadi SMAN, perubahan nama dan nomenklatur SMKN dan SLBN, serta terdapat 1 Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) mengalami perubahan jenis status menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Agustus 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. KOTA MATARAM			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 MATARAM	1	SMK NEGERI 1 MATARAM
2	SMA NEGERI 2 MATARAM	2	SMK NEGERI 2 MATARAM
3	SMA NEGERI 3 MATARAM	3	SMK NEGERI 3 MATARAM
4	SMA NEGERI 4 MATARAM	4	SMK NEGERI 4 MATARAM
5	SMA NEGERI 5 MATARAM	5	SMK NEGERI 5 MATARAM
6	SMA NEGERI 6 MATARAM	6	SMK NEGERI 6 MATARAM
7	SMA NEGERI 7 MATARAM	7	SMK NEGERI 7 MATARAM
8	SMA NEGERI 8 MATARAM	8	SMK NEGERI 8 MATARAM
9	SMA NEGERI 9 MATARAM	9	SMK NEGERI 9 MATARAM
10	SMA NEGERI 10 MATARAM		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 MATARAM		
2	SLB NEGERI 2 MATARAM		

2. KABUPATEN LOMBOK BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATULAYAR	1	SMK NEGERI 1 BATULAYAR
2	SMA NEGERI 1 GERUNG	2	SMK NEGERI 1 GERUNG
3	SMA NEGERI 2 GERUNG	3	SMK NEGERI 2 GERUNG
4	SMA NEGERI 1 GUNUNGSARI	4	SMK NEGERI 1 GUNUNGSARI
5	SMA NEGERI 1 KEDIRI	5	SMK NEGERI 1 KEDIRI
6	SMA NEGERI 1 KURIPAN	6	SMK NEGERI 1 KURIPAN
7	SMA NEGERI 1 LABUAPI	7	SMK NEGERI 2 KURIPAN
8	SMA NEGERI 2 LABUAPI	8	SMK NEGERI 1 LABUAPI
9	SMA NEGERI 1 LEMBAR	9	SMK NEGERI 1 LEMBAR
10	SMA NEGERI 2 LEMBAR	10	SMK NEGERI 1 LINGSAR
11	SMA NEGERI 3 LEMBAR	11	SMK NEGERI 2 LINGSAR
12	SMA NEGERI 1 LINGSAR	12	SMK NEGERI 1 NARMADA
13	SMA NEGERI 1 NARMADA	13	SMK NEGERI 1 SEKOTONG
14	SMA NEGERI 2 NARMADA	14	SMK NEGERI 2 SEKOTONG
15	SMA NEGERI 1 SEKOTONG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK BARAT		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT		

3. KABUPATEN LOMBOK TENGAH			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG	1	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG
2	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	2	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA
3	SMA NEGERI 1 JANAPRIA	3	SMK NEGERI 1 JANAPRIA
4	SMA NEGERI 1 JONGGAT	4	SMK NEGERI 1 JONGGAT
5	SMA NEGERI 2 JONGGAT	5	SMK NEGERI 1 KOPANG
6	SMA NEGERI 1 KOPANG	6	SMK NEGERI 1 PRAYA
7	SMA NEGERI 1 PRAYA	7	SMK NEGERI 1 PRAYA BARAT
8	SMA NEGERI 2 PRAYA	8	SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH
9	SMA NEGERI 3 PRAYA	9	SMK NEGERI 2 PRAYA TENGAH
10	SMA NEGERI 4 PRAYA	10	SMK NEGERI 1 PRAYA TIMUR
11	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT	11	SMK NEGERI 1 PUJUT
12	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA	12	SMK NEGERI 2 PUJUT
13	SMA NEGERI 1 PRAYA TENGAH	13	SMK NEGERI 1 PRINGGARATA
14	SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR		
15	SMA NEGERI 1 PRINGGARATA		
16	SMA NEGERI 2 PRINGGARATA		
17	SMA NEGERI 1 PUJUT		
18	SMA NEGERI 2 PUJUT		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TENGAH		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TENGAH		
3	SLB NEGERI 3 LOMBOK TENGAH		

4. KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AIKMEL	1	SMK NEGERI 1 KERUAK
2	SMA NEGERI 2 AIKMEL	2	SMK NEGERI 1 PRINGGABAYA
3	SMA NEGERI 1 JEROWARU	3	SMK NEGERI PRINGGASELA
4	SMA NEGERI 1 KERUAK	4	SMK NEGERI 1 SAKRA
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN HAJI	5	SMK NEGERI 1 SELONG
6	SMA NEGERI 1 MASBAGIK	6	SMK NEGERI 2 SELONG
7	SMA NEGERI 2 MASBAGIK	7	SMK NEGERI 3 SELONG
8	SMA NEGERI 1 MONTONG GADING	8	SMK NEGERI 1 SAMBELIA
9	SMA NEGERI 1 PRINGGABAYA	9	SMK NEGERI 1 SIKUR
10	SMA NEGERI 1 PRINGGASELA	10	SMK NEGERI 1 KOTARAJA
11	SMA NEGERI 1 SAKRA	11	SMK NEGERI 2 KERUAK
12	SMA NEGERI 1 SAKRA TIMUR		
13	SMA NEGERI 1 SAMBELIA		
14	SMA NEGERI 1 SELONG		
15	SMA NEGERI 2 SELONG		
16	SMA NEGERI 3 SELONG		
17	SMA NEGERI 1 SEMBALUN		
18	SMA NEGERI 1 SIKUR		
19	SMA NEGERI 1 SUELA		
20	SMA NEGERI 1 SUKAMULIA		
21	SMA NEGERI 1 SURALAGA		

22	SMA NEGERI 1 TERARA		
23	SMA NEGERI 1 WANASABA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TIMUR		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR		

5. KABUPATEN LOMBOK UTARA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BAYAN	1	SMK NEGERI 1 BAYAN
2	SMA NEGERI 2 BAYAN	2	SMK NEGERI 1 GANGGA
3	SMA NEGERI 1 GANGGA	3	SMK NEGERI 1 KAYANGAN
4	SMA NEGERI 1 KAYANGAN	4	SMK NEGERI 1 PEMENANG
5	SMA NEGERI 1 PEMENANG	5	SMK NEGERI 1 TANJUNG
6	SMA NEGERI 1 TANJUNG	6	SMK NEGERI 2 TANJUNG
7	SMA NEGERI 2 TANJUNG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK UTARA		

6. KABUPATEN SUMBAWA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 ALAS	1	SMK NEGERI 1 ALAS
2	SMA NEGERI 1 ALAS BARAT	2	SMK NEGERI 1 BUER
3	SMA NEGERI 1 EMPANG	3	SMK NEGERI 1 LENANGGUAR
4	SMA NEGERI 1 LABANGKA	4	SMK NEGERI 1 LOPOK
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN BADAS	5	SMK NEGERI 1 LUNYUK
6	SMA NEGERI 1 LAPE	6	SMK NEGERI 1 PLAMPANG
7	SMA NEGERI 1 LUNYUK	7	SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR
8	SMA NEGERI 1 MARONGE	8	SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR
9	SMA NEGERI 1 MOYO HULU	9	SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR
10	SMA NEGERI 1 MOYO UTARA	10	SMK NEGERI 1 TARANO
11	SMA NEGERI 1 ORONG TELU	11	SMK NEGERI 1 LABUHAN BADAS
12	SMA NEGERI 1 PLAMPANG		
13	SMA NEGERI 1 RHEE		
14	SMA NEGERI 1 ROPANG		
15	SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR		
16	SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR		
17	SMA NEGERI 3 SUMBAWA BESAR		
18	SMA NEGERI 4 SUMBAWA BESAR		
19	SMA NEGERI 1 UTAN		
C. SATUAN PENDIDIKAN			
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA		
2	SLB NEGERI 2 SUMBAWA		

7. KABUPATEN SUMBAWA BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BRANG REA	1	SMK NEGERI 1 BRANG ENI
2	SMA NEGERI 1 JERWEH	2	SMK NEGERI 1 BRANG REA
3	SMA NEGERI 1 POTO TANG	3	SMK NEGERI 1 MALUK
4	SMA NEGERI 1 SEKONGKANG	4	SMK NEGERI 1 SETELUK
5	SMA NEGERI 1 SETELUK	5	SMK NEGERI 1 TALIWANG
6	SMA NEGERI 1 TALIWANG		
7	SMA NEGERI 2 TALIWANG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA BARAT		

8. KABUPATEN DOMPU			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 DOMPU	1	SMK NEGERI 1 DOMPU
2	SMA NEGERI 2 DOMPU	2	SMK NEGERI 2 DOMPU
3	SMA NEGERI 3 DOMPU	3	SMK NEGERI 1 HUU
4	SMA NEGERI 1 HUU	4	SMK NEGERI 1 KEMPO
5	SMA NEGERI 1 KEMPO	5	SMK NEGERI 1 KILO
6	SMA NEGERI 2 KEMPO	6	SMK NEGERI 1 MANGGELEWA
7	SMA NEGERI 1 KILO	7	SMK NEGERI 2 MANGGELEWA
8	SMA NEGERI 2 KILO	8	SMK NEGERI 1 PEKAT
9	SMA NEGERI 1 MANGGELEWA	9	SMK NEGERI 1 WOJA
10	SMA NEGERI 2 MANGGELEWA		
11	SMA NEGERI 1 PAJO		
12	SMA NEGERI 1 PEKAT		
13	SMA NEGERI 2 PEKAT		
14	SMA NEGERI 3 PEKAT		
15	SMA NEGERI 1 WOJA		
16	SMA NEGERI 2 WOJA		
17	SMA NEGERI 3 WOJA		
18	SMA NEGERI 3 KILO		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 DOMPU		

9. KABUPATEN BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AMBALAWI	1	SMK NEGERI 1 LAMBU
2	SMA NEGERI 1 BELO	2	SMK NEGERI 1 WOHA
3	SMA NEGERI 1 BOLO	3	SMK NEGERI 1 WERA
4	SMA NEGERI 2 BOLO	4	SMK NEGERI 1 LANGGUDU
5	SMA NEGERI 3 BOLO	5	SMK NEGERI 1 DONGGO

6	SMA NEGERI 1 DONGGO	6	SMK NEGERI 1 SANGGAR
7	SMA NEGERI 2 DONGGO	7	SMK NEGERI 1 SOROMANDI
8	SMA NEGERI 3 DONGGO	8	SMK NEGERI 1 MONTA
9	SMA NEGERI 1 LAMBU	9	SMK NEGERI 1 BOLO
10	SMA NEGERI 1 LAMBU	10	SMK NEGERI 1 PALIBELO
11	SMA NEGERI 2 LAMBU	11	SMK NEGERI 2 WERA
12	SMA NEGERI 1 LANGGUDU	12	SMK NEGERI 2 SOROMANDI
13	SMA NEGERI 2 LANGGUDU	13	SMK NEGERI 2 LANGGUDU
14	SMA NEGERI 3 LANGGUDU		
15	SMA NEGERI 1 MADAPANGGA		
16	SMA NEGERI 2 MADAPANGGA		
17	SMA NEGERI 1 MONTA		
18	SMA NEGERI 2 MONTA		
19	SMA NEGERI 1 PALIBELO		
20	SMA NEGERI 1 PARADO		
21	SMA NEGERI 1 SANGGAR		
22	SMA NEGERI 1 SAPE		
23	SMA NEGERI 2 SAPE		
24	SMA NEGERI 3 SAPE		
25	SMA NEGERI 1 SOROMANDI		
26	SMA NEGERI 2 SOROMANDI		
27	SMA NEGERI 3 SOROMANDI		
28	SMA NEGERI 2 SANGGAR		
29	SMA NEGERI 1 TAMBORA		
30	SMA NEGERI 1 WAWO		
31	SMA NEGERI 2 WAWO		
32	SMA NEGERI 1 WERA		
33	SMA NEGERI 2 WERA		
34	SMA NEGERI 3 WERA		
35	SMA NEGERI 1 WOHA		
36	SMA NEGERI 2 WOHA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 BIMA		

10. KOTA BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 KOTA BIMA	1	SMK NEGERI 1 KOTA BIMA
2	SMA NEGERI 2 KOTA BIMA	2	SMK NEGERI 2 KOTA BIMA
3	SMA NEGERI 3 KOTA BIMA	3	SMK NEGERI 3 KOTA BIMA
4	SMA NEGERI 4 KOTA BIMA	4	SMK NEGERI 4 KOTA BIMA
5	SMA NEGERI 5 KOTA BIMA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 KOTA BIMA		


 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

 H. M. ZAINUL MAJDI